

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada pendahuluan ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi saat ini, Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, baik antar negara maupun organisasi internasional. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang dijalankan negara dan merupakan cerminan dari kepentingan nasional yang harus direalisasikan, tujuannya tidak lain adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya. Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya yang senantiasa berkembang selalu menyesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional, sehingga peran tersebut mampu dimainkan dengan baik.

Kehadiran organisasi internasional telah mengubah wajah dan warna percaturan politik luar negeri Indonesia. Keaktifan Indonesia dalam kancah global sudah berlangsung sejak tahun 1962, dalam hal ini telah terbukti bahwa Indonesia sebagai salah satu negara penghasil minyak bumi di kawasan Asia Tenggara tergabung dalam organisasi negara-negara pengekspor minyak yaitu OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*). OPEC merupakan organisasi permanen non-pemerintah yang dilahirkan dari hasil Konferensi Baghdad, Iraq pada 10-14 September 1960 atas inisiatif lima negara: Iran, Iraq, Kuwait, Arab Saudi dan Venezuela (OPEC, 2017). Kemudian pada tahun 1962

Indonesia resmi bergabung dengan OPEC dan menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam keanggotaan organisasi negara-negara pengekspor minyak dunia.

Dengan bergabung menjadi anggota OPEC, Indonesia mendapat berbagai keuntungan dan sangat berdampak positif karena memiliki kepentingan yang sama dengan negara-negara anggota OPEC lainnya. Sejak pertama kali bergabung dengan OPEC, Indonesia langsung membuktikan kelayakannya menjadi anggota organisasi negara produsen minyak ini dengan turut serta dalam pembuatan kebijakan-kebijakan tentang industri perminyakan. Salah satunya adalah menstabilisasi jumlah produksi dan harga minyak di pasar Internasional. Dari segi ekonomi, Indonesia mendapat keuntungan yaitu menikmati kenaikan harga minyak dari US\$ 2 per barrel menjadi US\$ 12 pascaembargo minyak perang Arab-Israel tahun 1974 (Rahman, 2014). Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kerja sama antarnegara merupakan hal yang sangat penting. Naik dan turunnya ekonomi suatu negara merupakan salah satu kondisi yang dapat mempengaruhi kestabilan politik di dalam negeri. Pada konteks ini, tidak lengkap ketika membahas ekonomi tanpa mempelajari kondisi politik dan tidak cukup apabila membahas politik tanpa mempelajari ekonomi. Ekonomi dan politik merupakan indikasi kemandirian suatu negara, sehingga pemerintah berkewajiban untuk membuat kebijakan yang seimbang agar stabilitas ekonomi dan politik tetap terjaga. Keberadaan OPEC diantara organisasi-organisasi negara berkembang yang ada sangat disegani, karena OPEC memiliki solidaritas dan diplomasi yang tinggi, sehingga salah satu kelebihan dari organisasi negara-negara pengekspor minyak ini sering dimanfaatkan Indonesia dalam diplomasinya menghadapi permasalahan nasional, seperti HAM dan integritas nasional.

Sejak terlibat menjadi anggota OPEC, posisi tawar Indonesia di forum internasional semakin meningkat, antara lain Indonesia mendapatkan gengsi politik OPEC yang memang diperhitungkan di kancah global. Meskipun fakta menunjukkan bahwa negara yang paling berpengaruh dalam menentukan kebijakan harga minyak di OPEC tentulah negara-negara produsen minyak raksasa, seperti Arab Saudi, Iraq dan Iran, tetapi suara Indonesia tetap diperhitungkan di OPEC, sebab Indonesia merupakan suatu negara yang cukup besar jika dibandingkan dengan negara-negara anggota OPEC lainnya (Satria, Kebijakan Pemerintah Indonesia Keluar Dari OPEC Tahun 2008, 2009). Sebagai negara besar dan satu-satunya negara anggota dari kawasan Asia Tenggara, OPEC menganggap posisi Indonesia sangat strategis di organisasi negara-negara pengekspor minyak ini, bahkan Indonesia sudah dianggap setara dengan *founder member* karena disamping peran historisnya, Indonesia juga merupakan salah satu anggota tertua.

Sejak berdirinya Sekretariat OPEC di Wina tahun 1965, Kedutaan Besar Republik Indonesia-Wina selalu terlibat aktif dalam kegiatan pemantauan harga minyak dan penanganan masalah substansi serta diplomasi diberbagai persidangan yang diselenggarakan oleh OPEC. Dalam organisasi ini, Indonesia pernah memainkan peran penting, yakni ketika Prof. Subroto menjadi wakil Indonesia terpilih sebagai Presiden Konferensi OPEC pada periode 31 Oktober 1984-9 Desember 1985. Setelah itu, beliau menjadi Sekretaris Jenderal *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) selama dua periode (1988-1991 dan 1991-1994). Pengangkatan Prof. Subroto sebagai Sekjen OPEC dilatar belakangi oleh ketegangan antara negara-negara anggota OPEC sendiri, terutama karena terjadinya peperangan antara Iraq dan Iran pada tahun 1988 dan sebelumnya yang menjabat sebagai Sekjen OPEC berasal dari Iraq.

Dalam kerangka keanggotaan Indonesia di OPEC, Subroto merupakan figur teladan yang penuh kearifan sehingga pantas dijuluki para menteri perminyakan negara-negara anggota OPEC sebagai “The Wiser Minister Subroto from Indonesia”. Menteri Subroto menaruh perhatian sangat tinggi terhadap perkembangan pasar minyak bumi, sikapnya yang senantiasa waspada dan teliti diharapkan pasar minyak bumi dunia dapat memberikan manfaat yang seimbang antara negara produsen dan negara konsumen. Ketajaman pemikiran Subroto sebagai wakil Indonesia sangat dihargai oleh menteri perminyakan negara-negara anggota OPEC yang lain. Sikapnya yang senantiasa seimbang dalam menghadapi pertentangan yang keras antara negara-negara OPEC (misalnya antara Arab Saudi dan Iran, antara negara-negara Teluk yang bersikap moderat dan Libya serta Aljazair yang sikapnya keras) menyebabkan para pemimpin negara-negara perminyakan anggota OPEC yang lain semakin meyakini kearifan Menteri Subroto dalam menangani kontroversi yang terjadi di antara mereka (GEOMAGZ Majalah Geologi Populer, 2015).

Namun seiring berjalannya waktu dan perubahan-perubahan yang mengiringi perjalanan Indonesia di OPEC, tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap keanggotaannya. Sejak pertengahan tahun 2014 hingga awal tahun 2016 harga minyak dunia mengalami penurunan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dan konsumsi dunia. Setelah harga minyak tak kunjung naik sedangkan jumlah produksi dan konsumsi minyak di negara-negara produsen semakin meningkat, OPEC mengeluarkan kebijakan untuk memangkas jumlah produksi minyak negara anggotanya dengan tujuan untuk menaikkan harga minyak dunia.

Sekilas berbalik ke belakang, pada tahun 2008 pemerintah Indonesia pernah mengambil kebijakan untuk keluar dari keanggotaan OPEC yang dilatar belakangi oleh status Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dengan

tingkat produksi yang terus menurun sehingga menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara Indonesia dan OPEC. Pada tanggal 30 November 2016, OPEC mengadakan sidang konferensi OPEC ke-171 di Wina, Austria yang menghasilkan kesepakatan untuk memotong kuota produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barrel per hari dari total produksinya. Jika dikonversi ke hitungan liter, 1 barrel sama dengan 159 liter (Wight Hat Ltd, 2003). Kesepakatan tersebut disetujui oleh seluruh negara anggota OPEC, kecuali Indonesia yang tidak menyepakati kebijakan tersebut.

Berdasarkan kebijakan Indonesia tidak menyepakati atas penurunan produksi yang dikeluarkan oleh OPEC dapat dilihat dari semua tujuan dasar pemerintah Indonesia mengaktifkan kembali keanggotaannya di OPEC pada awal tahun 2016, yaitu sebagai tindakan untuk meningkatkan ketahanan energi. Hal ini berhubungan dengan kondisi Indonesia yang memiliki kebutuhan energi cukup tinggi dan terus meningkat (Republika, 2015). Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dan melihat tujuan awal Indonesia bergabung dengan OPEC, pada waktu yang bersamaan dalam sidang konferensi OPEC ke-171 di Wina, Austria, secara sepihak Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan negara-negara pengekspor minyak ini. Pemerintah Indonesia beranggapan keputusan keluar dari keanggotaan OPEC lebih pas bagi Indonesia mengingat kondisi terkini yang sedang terjadi dan disamping itu tidak berdampak apapun terhadap Indonesia karena tidak terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang berlaku di OPEC.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

## ***“Mengapa Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC pada tahun 2016 ?”***

### **C. Landasan Teori**

Untuk menjawab Rumusan Masalah diatas, maka penulis menggunakan pendekatan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul *“Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis”*. Dalam teori ini dijelaskan bagaimana alur proses pengambilan kebijakan luar negeri dirumuskan beserta hal-hal yang mempengaruhinya.

Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa yang akan datang. Teori merupakan suatu bentuk pertanyaan yang menjawab pertanyaan “mengapa”, artinya, berteori adalah upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi (Mohtar Mas'oed, 1990).

William D. Coplin menjelaskan teori pembuatan kebijakan luar negeri dalam pernyataan teoritisnya sebagai berikut:

*“Apabila kita mempertanyakan kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan mengapa para pemimpin negara tersebut membuat kebijakan luar negeri. Namun, merupakan suatu kesalahan besar jika kita menganggap bahwa para pembuat kebijakan luar negeri (pemimpin negara) bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tertentu bisa dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pembuat keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri mengambil keputusan politik luar negeri; kedua, kemampuan ekonomi dan militer; dan ketiga, konteks internasional, yaitu posisi khusus suatu*

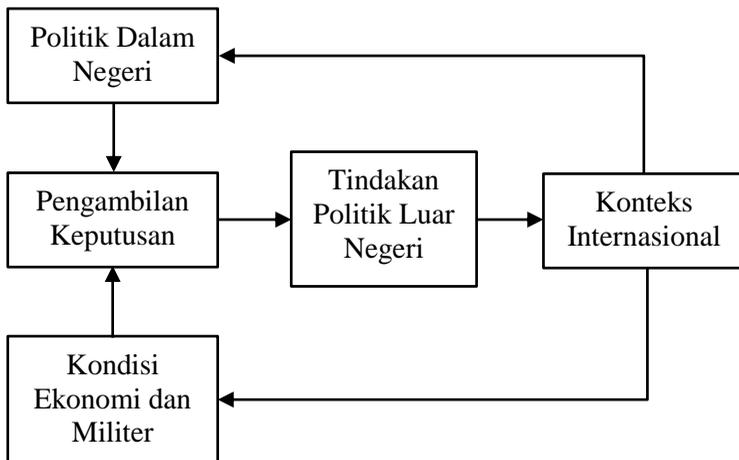
*negara dalam hubungannya satu negara dengan negara lain.”*  
(William D. Coplin, 1992).

Kebijakan luar negeri merupakan strategi dasar untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Para elit politik akan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan luar negeri yang dilakukan dalam menyikapi isu-isu tertentu, sehingga kepentingan nasional negara tersebut dapat tercapai. Setiap individu atau kelompok tidak dapat mengambil kebijakan tanpa pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhinya.

Berikut adalah skema teori pembuatan kebijakan politik luar negeri:

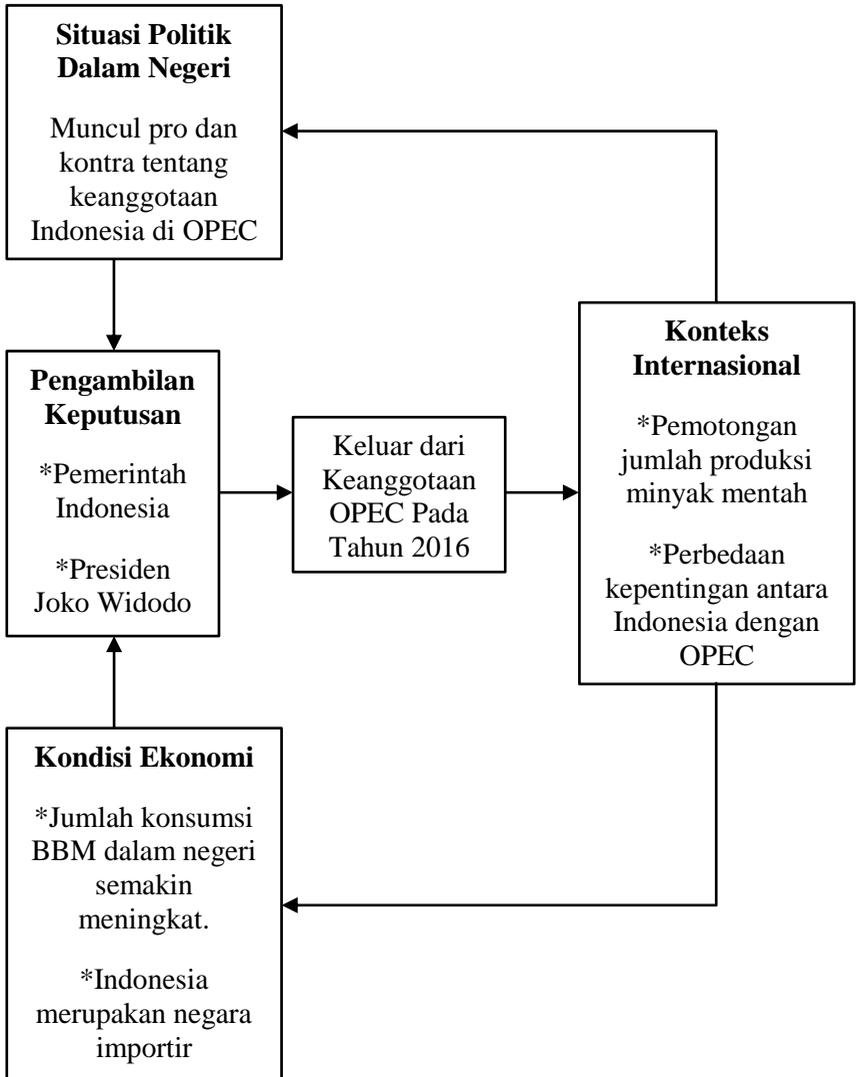
#### Skema 1.1

#### Model Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri (Menurut William D. Coplin dalam Bukunya Marsedes Marbun)



## Skema 1.2

Aplikasi Model Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri  
Studi Kasus Kebijakan Indonesia Keluar dari Keanggotaan  
OPEC pada Tahun 2016 (diakses dari berbagai sumber):



Berdasarkan skema diatas bisa dijelaskan mengapa Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC pada tahun 2016. Kebijakan tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi, dan konteks internasional yang sangat berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia.

### 1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, kondisi politik dalam negeri memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara dan di dalamnya terdapat asumsi tentang perbedaan yang mendasar serta bersifat lintas nasional. Dengan kata lain, setiap kebijakan luar negeri merupakan kelanjutan dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam situasi dan kondisi-kondisi tertentu. Situasi politik dalam negeri yang dimaksud adalah interaksi antara pengambil keputusan luar negeri dengan elit politik dalam negeri yang biasa disebut "*policy influencers*". Hubungan antara aktor-aktor dalam negeri dengan pengambil keputusan luar negeri disebut "*policy influence system*". Dalam situasi tersebut antara keduanya terjadi timbal balik sehingga akan mempengaruhi setiap kebijakan yang hendak diambil. Banyak analis politik internasional yang berargumentasi bahwa konsekuensi-konsekuensi yang mempersatukan dari krisis eksternal sering menyebabkan para pengambil keputusan politik luar negeri, yang dihadapkan pada instabilitas di dalam negeri, menjadi agresif di luar negeri. Dalam konteks politik dalam negeri tersebut sangat jelas bahwa "*policy influencers*" sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Coplin juga menyebutkan dalam bukunya, bahwa ada empat tipe "*policy influencers*". Pertama, birokrat yang mempengaruhi, kedua, partai yang mempengaruhi, ketiga, kepentingan yang mempengaruhi, dan yang terakhir adalah massa yang mempengaruhi (William D. Coplin, 1992).

Kondisi politik dalam negeri Indonesia pasca terjadinya reformasi tepatnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo relatif stabil dan kondusif. Pada era reformasi sekarang ini, pola kekuasaan tidak lagi bersifat represif seperti masa orde baru dimana pemerintahan lebih menekankan pada kekuasaan negara atau terpusat pada lembaga kepresidenan. Dengan demikian, masyarakat diberikan kebebasan oleh pemerintah dalam hal mengutarakan pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2008, Indonesia pernah memutuskan untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Seiring berjalannya waktu pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tepatnya pada Januari 2016 Indonesia kembali aktif menjadi anggota OPEC. Kebijakan Indonesia kembali bergabung dengan OPEC adalah agar bisa lebih mudah mengikuti dinamika dalam industri migas sehingga dapat mengetahui informasi naik turunnya harga dan kondisi stok minyak di setiap negara pengekspor minyak. Akan tetapi, status keanggotaan Indonesia dalam OPEC menjadi wacana perdebatan berbagai pihak di dalam negeri sehingga menuai adanya sikap pro dan kontra. Sejak tahun 2003, Indonesia sudah dianggap sebagai negara importir bersih (*net-importer*). Padahal, seperti yang kita ketahui bahwa OPEC merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak yang mana salah satu syarat menjadi anggotanya adalah negara eksportir bersih (*net-exporter*). Dengan melihat kondisi tersebut, keanggotaan Indonesia dalam OPEC tidak akan memiliki pengaruh yang cukup berarti dalam setiap penentuan kebijakan. Itulah salah satu alasan yang mendorong pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC.

## 2. Kondisi Ekonomi dan Militer

Kondisi ekonomi dan militer memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri karena tidak hanya dalam sebuah komitmen, suatu negara harus diimbangi oleh kekuatan pertahanan dan keamanan serta bersedia untuk

menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya. Dalam analisa Coplin berawal dari perilaku raja-raja Eropa di abad pertengahan yang mana dua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Ketika kemampuan militer suatu negara semakin meningkat, maka raja dapat mengendalikan perdagangan dan bisnis secara ekstensif (William D. Coplin, 1992).

Kondisi ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara melihat GNP-nya (Gross National Product), yaitu semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun (Alpari, 1998). Selain GNP, indikator ekonomi lainnya adalah pendapatan perkapita serta dengan melihat potensi pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal militer, kekuatan militer suatu negara tidak hanya bergantung pada jumlah personal, tingkat pelatihan, dan perlengkapan angkatan bersenjatanya, tetapi juga bergantung pada tingkat dukungan luar negeri serta peran angkatan bersenjatanya dalam memelihara stabilitas dalam negeri. Ketika ekonomi dan militer suatu negara sama-sama kuat maka hal tersebut dapat meningkatkan *bargaining position* dengan negara lain (William D. Coplin, 1992).

Jika dilihat dari segi militer, kebijakan pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC memang tidak ada kaitannya, akan tetapi jika dilihat dari segi ekonomi dampaknya cukup signifikan, sidang OPEC ke-171 di Wina, Austria, menghasilkan keputusan untuk memotong kuota produksi minyak mentah negara anggotanya sebesar 1,2 juta barrel per hari dari total produksinya. Indonesia sendiri diminta untuk memotong jumlah produksi sebesar 5% atau setara dengan 37.000 barrel per hari. Jika Indonesia menyetujui kebijakan tersebut maka akan menyebabkan menurunnya angka penerimaan negara dan berpotensi terhadap kenaikan harga-harga komoditas di dalam negeri sehingga akan membuat negara mengalami inflasi, sedangkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(RAPBN) 2017 telah disepakati bahwa produksi minyak hanya turun sebesar 5000 barrel per hari. Dengan demikian sangat tidak sesuai dengan harapan dan kepentingan nasional yang akan mempengaruhi terhadap jumlah penerimaan negara terutama pada sektor minyak dan gas. Kemudian dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang buruk dan tingkat pemakaian BBM dalam negeri semakin meningkat, maka Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan OPEC.

### 3. Konteks Internasional

Konteks internasional merupakan aktivitas suatu negara yang melaksanakan politik luar negerinya untuk mempengaruhi negara lain guna kepentingan tertentu. Menurut Coplin, terdapat tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis, dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu, juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara-negara lain. Pada abad ke-20 seorang ilmuwan realis, Hans J. Morgenthau berargumentasi bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang objektif (William D. Coplin, 1992).

Menurunnya harga minyak dunia yang terjadi sejak tahun 2014 hingga awal tahun 2016, telah mendorong OPEC untuk meregulasi kuota produksi minyak mentah negara-negara anggotanya dengan tujuan untuk menaikkan harga minyak dalam jangka pendek. Keputusan sidang OPEC untuk memotong produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barrel per hari telah membuktikan adanya perbedaan kepentingan mendasar antara Indonesia dan OPEC. Tampak jelas ketika Indonesia perlu menambah produksi untuk meningkatkan

angka penerimaan APBN, tetapi OPEC meminta untuk memotong produksi. Kondisi ini membuat pemerintah Indonesia berani mengambil langkah untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Dengan demikian, jika Indonesia tetap aktif sebagai anggota OPEC dapat dipastikan akan sering menghadapi keputusan-keputusan yang berbeda kepentingan, baik dengan OPEC maupun dengan negara-negara anggota OPEC (Iskana, 2016). Itulah alasan yang meyakinkan pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan luar negerinya.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

1. Berdasarkan kondisi politik dalam negeri, adanya perubahan status produksi minyak telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan keluar dari OPEC.
2. Berdasarkan kondisi ekonomi, pemotongan kuota produksi sebesar 1,2 juta barrel per hari akan merugikan perekonomian Indonesia.
3. Sedangkan berdasarkan konteks internasional, regulasi yang dikeluarkan OPEC tidak menguntungkan bagi produksi minyak dalam negeri.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penulisan karya tulis ini adalah:

1. Sebagai syarat mendapatkan gelar strata satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui sebab-sebab atau alasan mengapa Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC pada tahun 2016.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk memudahkan penulisan, maka perlu ditetapkan batasan penulisan. Penulis membatasi jangkauan penelitian hanya pada segi politik, ekonomi dan konteks internasional dari rentang waktu 2008-2016, yaitu pascapertama kali Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC pada tahun 2008 kemudian pada awal tahun 2016 Indonesia kembali bergabung dengan OPEC dan pada akhir tahun 2016 Indonesia memutuskan untuk keluar lagi dari keanggotaan OPEC.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang mendukung, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Detail yang dijelaskan melalui data sekunder yaitu dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan, artikel, surat kabar, website dan sumber lain yang dapat menunjang karya tulis ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis membagi ke dalam beberapa bab guna mempermudah menyusun pembahasan dan uraian-uraian. Sistematika penulisan yang akan dijabarkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

**BAB I**      Pendahuluan berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan Teori, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

- BAB II** Bab kedua membahas dinamika OPEC sebagai organisasi internasional yang meliputi sejarah singkat lahirnya OPEC, tujuan dan fungsi organisasi OPEC, struktur organisasi dan manajemen OPEC, keanggotaan OPEC, keuangan OPEC, dan kuota produksi minyak OPEC.
- BAB III** Bab ketiga membahas mengenai kontribusi Indonesia di OPEC, mulai dari proses Indonesia bergabung dengan OPEC, peran Indonesia di OPEC, keuntungan Indonesia bergabung dengan OPEC, dan kondisi Indonesia ketika keluar dari OPEC.
- BAB IV** Bab keempat membahas mengenai analisis faktor-faktor pertimbangan Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC, berdasarkan kondisi politik dalam negeri, ekonomi dan militer, serta konteks internasional.
- BAB V** Bab lima berisikan ringkasan singkat tentang penelitian dari seluruh pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.